

## **PENANGANAN BENCANA LETUSAN GUNUNG GALUNGGUNG PADA TAHUN 1982-1983**

**Gregorius Andika Ariwibowo**

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat  
Jl. Cinambo 136 Ujungberung, Bandung  
andikaariwibowo@gmail.com

### **Abstrak**

*Letusan Gunung Galunggung merupakan salah satu bencana besar di Indonesia. Letusan yang berlangsung selama sekitar delapan bulan ini telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk di tiga kabupaten di Jawa Barat. Kajian ini mencoba menjabarkan mengenai upaya pemerintah, terutama pemerintahan Orde Baru dalam penanganan bencana letusan Gunung Galunggung. Kajian ini memiliki peran penting dalam melihat alur perkembangan penanganan bencana oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan orde baru yang dikenal dengan sistem pemerintahan yang terpusat. Penanganan bencana merupakan upaya penanganan langsung terhadap para korban sesaat setelah bencana terjadi. Kajian ini menggunakan metodologi sejarah dengan menggali pada sumber-sumber yang merekam dan mendokumentasikan peristiwa ini. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pemerintah Orde Baru menggunakan perangkat sipil dan militer dalam upaya penanganan bencana. Pengaruh dari konsolidasi penanganan yang dilakukan secara sistematis ini berjalan dengan sangat baik antara aparat pemerintah, peneliti, militer, dan tim SAR dalam menangani para pengungsi dan dampak bencana yang lain.*

**Kata kunci:** sejarah penanganan bencana, sejarah lingkungan, letusan Gunung Galunggung

## **DISASTER RELIEF OF GALUNGGUNG VOLCANIC ERUPTION IN 1982-1983**

### **Abstract**

*Galunggung eruption was one of the enormous disaster in Indonesia. Galunggung eruption hit continuously around eight months and crackdown in a most density population area in three regency areas in West Java province. This chapter point is want observe the roles of government to manage disaster relief, especially during Galunggung eruption disaster by the New Order regime. Disaster relief refers to interventions aimed at meeting the immediate needs of the victims of a disastrous event. This studies used a historiography methodology to reconstruct disaster relief event of Galunggung eruption. Conclusion of this study underlines that New Order used their civil and military power to manage the situation in Galunggung. The impact was so good because they used a systematic order to consolidate many organization from local government, researcher, and Save and Rescue (SAR) to handle the situation.*

**Keywords:** disaster relief history, environment history, Galunggung Volcanic eruption

## **I. PENDAHULUAN**

Letak Indonesia yang berada di jalur lingkaran gunungapi Pasifik (*Pacific Ring of Fire*) menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor (Bobrowsky, 2013:389; Reid dalam Henley dan Nordholt, 2015:62 dan 65). Namun demikian meskipun merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam, kondisi geologi Indonesia yang demikian ini justru memberikan anugerah bagi Indonesia. Salah satunya adalah kondisi tanah yang subur di daerah sekitar gunung berapi yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat di negeri ini. Masyarakat dan budaya Indonesia pun juga lahir dan tumbuh seiring dengan berbagai bencana yang terjadi. Berbagai upacara persembahan kepada alam, gunung, dan laut dapat ditemui di hampir setiap kebudayaan pada masyarakat Indonesia.

Salah satu peristiwa bencana alam mutakhir yang terjadi di Indonesia masih terekam jelas dalam ingatan yakni gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias pada tahun 2004. Peristiwa mengenai gempa bumi dan tsunami ini telah menyita perhatian dan menyentuh sisi humanis khalayak dunia. Ratusan ribu korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar menjadi penanda bahwa Indonesia harus sigap dalam menghadapi setiap ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Peristiwa yang terjadi di Aceh ini menjadi perhatian dunia internasional. Penanganan dan pemulihan korban bencana dan tsunami Aceh ini menjadi salah satu tonggak dari solidaritas masyarakat dunia. Organisasi-organisasi kemanusiaan dari berbagai belahan dunia berdatangan dan membantu tanpa memandang latar belakang budaya dan sosial. Rajib Shaw menyebut peristiwa pemulihan bencana ini merupakan solidaritas sosial dari komponen-komponen masyarakat sipil dunia (Shaw, 2015:6). Berbagai organisasi pemerintah dan non pemerintah mengumpulkan berbagai bantuan dan mengambil peran dalam penanganan bencana di sekitar 14 negara korban tsunami pada saat itu. Di Indonesia sendiri pemerintah membuka pintu kepada berbagai organisasi kemanusiaan untuk berperan dalam pemulihan bencana di Aceh dan Nias.

Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias pada tahun 2004 terjadi ketika dunia telah saling terhubung dalam jaringan komunikasi dan informasi global. Televisi dan internet menjadi pembawa pesan tentang berbagai dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini. Hanya dalam hitungan menit bencana kemanusiaan yang terjadi di Aceh dan Nias segera menimbulkan simpati dunia. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias mencatat sekitar 124 lembaga kemanusiaan asing, 430 lembaga kemanusiaan lokal, perwakilan palang merah dan militer dari berbagai negara, serta ribuan sukarelawan individu yang aktif dalam upaya pemulihan bencana di Aceh dan Nias. Selain itu juga berbagai bantuan uang, bahan makanan, obat-obatan, dan berbagai bantuan sosial lain yang berasal dari solidaritas masyarakat dunia untuk membantu dalam pemulihan Aceh dan Nias pasca bencana (BRR Aceh-Nias, 2005: 13-14; Brassard dan Raffin, 2011: 418; Bobrowsky, 2013: 382).

Sekitar 22 tahun sebelum gempa bumi dan tsunami melanda Aceh serta Nias, terjadi bencana besar lain di Indonesia yakni bencana letusan Gunung Galunggung. Letusan Gunung Galunggung yang dimulai pada tanggal 5 April 1982 memang tidak menyebabkan kerugian materiil seperti yang terjadi di Aceh dan Nias pada tahun 2004. Namun peristiwa letusan Galunggung yang berlangsung pada masa rezim militer Orde Baru ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat terutama di tiga kabupaten di Jawa Barat yakni di Kabupaten Taskmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Hal ini karena peristiwa letusan Gunung Galunggung berlangsung selama delapan bulan.

Di samping peristiwa letusan Gunung Galunggung kajian ini juga membahas mengenai penanganan bencana alam pada masa pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dan didominasi kekuatan militer dalam segala aspek pemerintahannya tentu memiliki cara tersendiri dalam menangani bencana alam yang terjadi. Kajian ini mencoba menjabarkan mengenai upaya pemerintah, terutama pemerintahan Orde Baru dalam penanganan bencana letusan Gunung Galunggung. Kajian ini memiliki peran penting dalam melihat alur perkembangan penanganan bencana oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru. Penekanan penting dalam kajian ini adalah melihat bagaimana pemerintah Orde Baru mampu mengerahkan segala kekuatan sipil dan militernya untuk mengatasi dan mengelola penanganan bencana di suatu wilayah terdampak bencana?.

Bencana letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982 hingga 1983 merupakan suatu peristiwa yang menarik. Peristiwa ini menyebabkan lebih kurang 30.000 orang harus mengungsi dan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi sekitar 297.000 orang. Selain itu

sekitar 161.000 hektar lahan mengalami kerusakan, serta kerugian materiil di tiga kabupaten, yakni Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis mencapai sekitar 47 milyar rupiah berdasarkan perhitungan nilai uang pada tahun 1982 (Laporan Direktorat Vulkanologi, 1982:7). Berdasarkan atas data tersebut kajian ini tentu memberikan suatu gambaran menarik mengenai penanganan bencana oleh pemerintah Orde Baru khususnya dalam hal penanganan pengungsi. Lingkup waktu kajian dibatasi pada periode letusan terjadi yakni dari tanggal 5 April 1982 hingga 7 Januari 1983. Pembatasan ini dilakukan karena kajian ini hanya berfokus pada tahap penanganan bencana letusan Gunung Galunggung.

Penanganan bencana merupakan tahapan dalam sistem manajemen bencana. Penanganan bencana merupakan suatu tindakan tanggap darurat pada masa kritis setelah bencana terjadi. Penanganan bencana dilakukan sesaat setelah terjadi kerusakan pada fasilitas publik, rusaknya akses transportasi dan komunikasi, terputusnya akses listrik dan air, jatuhnya korban jiwa dan korban luka, serta kerusakan pada sekitar lingkungan tempat tinggal penduduk (Bobrowsky, 2013: 159).<sup>1</sup>

Kajian mengenai sejarah bencana alam di Indonesia selama ini kurang mendapatkan perhatian dari para pemerhati sejarah Indonesia. Anthony Reid dalam salah satu artikelnya pun menyoroti secara mendalam mengenai hal ini. Menurut Reid berdasarkan kondisi alam geografis Indonesia dimana seringkali terjadi rangkaian bencana alam, seharusnya kajian mengenai bencana alam menjadi salah satu kajian penting dalam kajian historiografi Indonesia. Kajian mengenai bencana alam selama ini hanya menjadi topik pembahasan mendalam dari para ahli seismologi, geologi, klimatologi dan kajian-kajian ilmu alam yang lain (Reid dalam Henley dan Nordholt (ed.), 2015:62). Berdasarkan pendapat Anthony Reid tersebut, maka kajian ini mencoba memberikan wacana baru dalam menambah resensi kajian historiografi Indonesia, khususnya yang terkait dengan sejarah lingkungan dan kebencanaan.

Salah satu kajian menarik mengenai sejarah penanganan bencana di Indonesia dibahas oleh Alicia Schrikker. Ia membahas mengenai penanganan bencana di Indonesia dari periode 1840 hingga 1920 dengan berfokus pada dua letusan gunung yakni Gunung Gamalama di Ternate dan Gunung Awu di Sulawesi Utara. Kajian ini sangat menarik sebab Schrikker membahas mengenai penanganan bencana ini di dalam sudut pandang politik dan kebijakan kolonial pada saat itu. Schikker juga membahas bencana tersebut dalam sudut pandang dinamika kultural dan religius masyarakat lokal ketika peristiwa-peristiwa bencana itu terjadi (Schrikker dalam Bankoff dan Joseph Christensen, 2016: 225-254).

Kajian mengenai letusan Gunung Galunggung sendiri belum mendapat perhatian dari para peneliti dalam bidang kajian ilmu sejarah. Kajian mengenai letusan Gunung Galunggung telah dibahas oleh dua orang ahli vulkanologi yakni Sutikno Bronto (1989) dan John Lockwood (Lockwood dan Hazlett, 2010) yang pada saat itu terlibat dalam proses penanganan dan pemulihan bencana. Kedua penulis ini memberikan gambaran dari sejarah dan karakter erupsi Gunung Galunggung. Kedua kajian ini sangat penting dalam merangkai fakta-fakta dari kejadian langsung selama periode letusan, serta melihat dinamika yang ada di masyarakat pada saat itu.

Kajian mengenai “Penanganan Bencana Letusan Gunung Galunggung Pada Tahun 1982-1983” merupakan suatu kajian sejarah. Maka berdasarkan hal itu kajian ini menggunakan metodologi ilmu sejarah yang terdiri dari penentuan tema, penelusuran dan kritik sumber serta bahan kajian, lalu terakhir adalah tahap penulisan karya sejarah ini. Sumber dan bahan bacaan dalam penyusunan kajian ini menggunakan laporan-laporan bencana letusan Gunung Galunggung yang terdapat di Perpustakaan Direktorat

---

<sup>1</sup> Manajemen bencana dapat dibagi menjadi empat tahap yakni a) Tahap mitigasi bencana, b) Tahap persiapan bencana, c) Tahap penanganan bencana, serta d) tahap pemulihan bencana (Bobrowsky, 2013: 159)

Vulkanologi. Laporan-laporan ini disusun oleh para ahli dari lintas bidang yang pada saat itu berperan aktif dalam upaya penanganan bencana letusan Gunung Galunggung.

## II. LETUSAN GUNUNG GALUNGGUNG PADA TAHUN 1822 DAN 1982

Pada malam hari tanggal 5 April 1982 penduduk di sekitar Kabupaten Garut dan Tasikmalaya dikejutkan oleh letusan keras dari arah Gunung Galunggung. Letusan Gunung Galunggung ini sangat mengagetkan mengingat pada penelitian yang dilakukan pada tahun 1981 tidak ada tanda akan terjadinya letusan (Bronto, 1989:80). Sebelum letusan tahun 1982, letusan terakhir Gunung Galunggung terjadi pada tahun 1918. Letusan pada tahun 1918 tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa, hanya menyebabkan munculnya kubah lava di puncak Gunung Galunggung (Bronto, 1989:80). Letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982 termasuk dalam letusan yang sangat besar dengan skala VEI (*Volcanic Explosivity Index*) 4.<sup>2</sup> Letusan gunung berapi dalam skala VEI 4 biasanya memiliki ciri letusan yang diawali dengan letusan besar yang kemudian disusul oleh guguran awan panas (*erosive pyroclastic surges*) (Bobrowsky, 2015: 291-292).

Gunung Galunggung memiliki ketinggian 2168 m dan menempati area sekitar 275 km<sup>2</sup>. Gunung Galunggung terletak di antara tiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis (Kusumadinata dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986:3; Bronto, 1989:2). Tiga kabupaten ini memiliki pemandangan alam yang indah dan tanah yang subur. Ketiga kabupaten yang terletak di lereng Gunung Galunggung merupakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sebagian besar penduduk yang hidup di sekitar lereng Gunung Galunggung menyandarkan kehidupan dari bercocok tanam.



Gambar 1: Letak Gunung Galunggung yang berada dekat dengan Kota Tasikmalaya (Sumber: J,P Lockwood and R Hazlet, 2010)

Sepanjang sejarah terutama sejak abad ke-19 Gunung Galunggung telah beberapa kali mengalami erupsi. Salah satu erupsi terbesar pada abad ke-19 terjadi pada tahun 1822. Pada tanggal 8 Oktober 1822 antara pukul 13.00 dan 14.00 terdengar suara gemuruh dari arah Gunung Galunggung yang kemudian diikuti oleh gumpalan asap raksasa yang melonjak keluar hingga menutupi langit Tasikmalaya, serta kemudian diikuti oleh guguran hujan abu yang menutupi wilayah Jawa Barat bagian timur. Letusan ini kemudian diikuti oleh guguran awan panas yang mengarah ke Sungai

Citanduy hingga jarak 16 km. Lebih kurang satu jam setelah letusan pertama hujan bercampur guguran abu merusak tanaman dan lingkungan seluas lebih kurang 40 km ke arah bagian barat dan selatan Gunung Galunggung. Pada tanggal 12 Oktober 1822 atau empat hari setelah erupsi, banjir lahar dingin menyapu desa-desa di sebelah tenggara lereng gunung. Korban jiwa yang ditimbulkan akibat letusan ini mencapai lebih kurang 4011 orang. Disamping itu peristiwa ini juga menghancurkan sekitar 114 desa, 2933 bidang sawah, dan 775,795 tanaman kopi di sekitar daerah letusan. Letusan Gunung Galunggung pada tahun 1822 mencapai skala VEI 5 (Kusumadinata, dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986:6-7; de Neve dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986a:46-48; Bronto, 1989:49, 68-78;).

<sup>2</sup> VEI (*Volcanic Eruption Index*) adalah skala yang mengukur kekuatan letusan gunung api. Skala VEI terdiri dari skala 0 sampai 8. Skala VEI dengan poin 4 seperti halnya letusan Gunung Galunggung termasuk dalam level perusak (*Destruction Capacity*). Sementara letusan Gunung Tambora yang merupakan salah satu letusan terbesar sepanjang sejarah modern berada pada skala VEI 7 (Bobrowsky, 2015: 1081).



Gambar 2: Letusan Gunung Galunggung pada tanggal 15 April 1982  
(Sumber: Harian Kompas/FX Puniman, 1982 dalam Chandra, 2012)

Pada tahun 1894 dan tahun 1918 Gunung Galunggung kembali meletus, namun letusan kali ini tidak sebesar yang terjadi pada tahun 1822. Menurut data yang disampaikan oleh G.A. de Neve dan Kusumadinata berdasarkan laporan dari pemerintah kolonial saat itu kedua letusan ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun pada letusan tahun 1894 banjir lahar dingin Galunggung merusak sekitar 50 desa di sekitar kaki gunung. Kemudian selama lebih kurang 64 tahun Gunung Galunggung seakan “tertidur”, meskipun pada tahun 1950 terjadi longsor di kawasan sekitar kawah yang mengakibatkan banjir lahar dingin yang menyebabkan warga sekitar harus mengungsi (Kusumadinata dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986:6; De Neve dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986a:56).

Setelah tidak aktif selama 64 tahun, pada malam hari pukul 22.00, tanggal 4 April 1982 terjadi gempa bumi di daerah sekitar kawah Gunung Galunggung. Gempa ini dirasakan oleh penduduk di lereng Gunung Galunggung. Sekitar pukul 02.00 terdengar suara gemuruh dan gempa bumi di sekitar lereng Gunung Galunggung yang kemudian disusul oleh letusan pertama Gunung Galunggung. Asap hitam bercampur guguran material berlangsung hingga pukul 16.00. Abu letusan Gunung Galunggung pada sore hari tanggal 5 April 1982 telah berjatuh di Kota Bandung yang berjarak 100 km dari pusat letusan. Para penduduk di jarak sekitar 6 km dari puncak Gunung Galunggung segera diungsikan ke sekitar Kota Tasikmalaya. Pada letusan pertama ini sekitar 31.000 orang mengungsi, namun pada sore hari tanggal 5 April para pengungsi dapat diperbolehkan kembali ke rumah. Letusan pada 5 April 1982 menjadi awal dari drama kisah mencekam Galunggung selama delapan bulan (McClelland, 1982b; de Neve dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986a:367).

Letusan Gunung Galunggung kedua berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 April 1982. Letusan kedua ini diikuti oleh guguran awan panas dan aliran lahar dingin dengan kecepatan sekitar 60 km/jam ke arah Sungai Cikunir hingga jarak 11 km dari puncak. Pada letusan kedua ini juga mengakibatkan enam desa tertutup aliran lahar dingin, menghancurkan sebuah jembatan, dan merusak ribuan hektar persawahan. Pihak berwenang dari pemerintah meminta agar beberapa area sekitar letusan ditutup sebab adanya semburan gas beracun (McClelland, 1982a).

Beberapa kesaksian dari para penduduk yang ketika itu mengalami langsung kejadian letusan awal Gunung Galunggung ini didokumentasikan oleh *Kompas* berikut ini.

“Heri Supartono, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Galunggung, yang berkantor di Desa Padakembang, 5 kilometer di bawah kawah Galunggung, barangkali merupakan orang paling tahu karakter Galunggung sejak letusan 5 April 1982. Peralnya, Heri yang saat itu masih calon pegawai negeri sipil langsung ditempatkan di pos pengamatan Cikasah, 6 kilometer dari kawah, sehari setelah Galunggung meletus. Letusan pada April 1982 merupakan erupsi gunungapi yang tergolong dahsyat di pengujung abad ke-20. “Bayangkan, jika gunung itu mau meletus, Bumi bergoyang dan kantor kami seperti perahu digoyang gelombang samudra,” kenang Heri.” (Muhtadi, 2015)

“Eming (46), warga Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, baru berusia 16 tahun ketika Gunung Galunggung meletus. Saat itu, dini hari, Eming sedang lelap dalam tidurnya di sebuah pesantren di Cihideung. Eming terbangun oleh kedatangan Pak Kiai yang membangunkan para santri untuk shalat. Sewaktu mengambil air wudu, Eming

menyaksikan Galunggung meletus. Awan letusan membubung ke langit, seperti bunga kol raksasa. Kira-kira pukul empat pagi, para santri, termasuk Eming, bergegas pulang ke rumah. Eming mendapati keluarganya sudah menggendong pakaian dan bersiap turun ke jalan hendak mengungsi. Abu dan batu seperti tercurah dari langit. Pagi hari gelap seperti maghrib. "Kerudung saya jadi hitam tertutup abu," ujarnya.

Eming bersama keluarganya berjalan kaki menuju Desa Tawang Banteng untuk mengungsi. Di tempat itu, orang hiruk-pikuk. Sudah ada banyak kendaraan yang akan membawa pengungsi ke Kota Tasikmalaya. Eming dan keluarganya ikut mengungsi ke kota. Di Tasikmalaya, dia tinggal di bedeng pengungsian. Orang-orang di Kota Tasikmalaya tak kalah paniknya. Sementara warga dari kaki Galunggung berbondong-bondong masuk ke Tasikmalaya, penghuni kota itu malah mengungsi ke luar kota." (Chandra, 2012)

Di samping itu terdapat juga kesaksian dari John Lockwood seorang peneliti vulkanologi yang membantu di tim Volcanological Survey of Indonesia (VSI) dari Direktorat Vulkanologi. John Lockwood yang ketika itu bertugas bersama dengan VSI di pos pengamatan Gunung Galunggung di Desa Cikaasah, Tasikmalaya menjadi saksi dari evakuasi para korban akibat letusan Gunung Galunggung pada bulan Juli 1982.

Desa Cikaasah berjarak sekitar 6 km dari puncak Gunung Galunggung. Para penduduk sebenarnya pada awal letusan telah mengungsi namun mereka kembali lagi ke desa ketika Gunung Galunggung sempat dinyatakan tidak berbahaya lagi. Pos pengamatan VSI di desa Cikaasah beberapa jam sebelumnya diperintahkan untuk segera mengevakuasi para penduduk dari sekitar lokasi pos. Perintah pengevakasian ini datang dari kantor pusat VSI di Bandung yang memperkirakan akan terjadi lagi letusan susulan dari kawah Gunung Galunggung (Lockwood dan Hazlett, 2010:6).

Sesaat setelah pengumuman yang dilakukan oleh tim VSI dan Satkorlak para penduduk dari sekitar desa kemudian berusaha keluar dari lingkungan tinggal mereka untuk mengungsi dan menyelamatkan diri. Lockwood menyaksikan para pengungsi ini mengenakan kantong plastik, sarung, handuk, atau pakaian untuk menutupi wajah mereka dari hujan abu. Para pengungsi ini membawa pakaian seadanya di dalam tas atau keranjang yang mereka miliki. Ia juga melihat anak-anak kecil turut menggendong adik-adik mereka yang masih kecil sambil mengiring ternak-ternak kerbau mereka dengan didampingi oleh para orang tua mereka. Sesampainya di balai desa rombongan pengungsi ini kemudian telah ditunggu oleh truk-truk tentara yang akan membawa mereka ke lokasi-lokasi pengungsian di Kota Tasikmalaya (Lockwood dan Hazlett, 2010: 6-7).

Lockwood juga menceritakan bahwa pada bulan Agustusia sempat ditanya oleh seorang penduduk mengenai kapan letusan Gunung Galunggung. Penduduk yang bertanya ini menurut Lockwood nampak khawatir karena ia takut tidak akan kembali lagi ke Galunggung, sebab penduduk ini termasuk ke dalam kelompok penduduk yang akan ditransmigrasikan ke Pulau Sumatera. Pertanyaan dari penduduk tersebut merupakan pertanyaan yang ketika itu sulit untuk dijawab. Lockwood dan ketua tim VSI yang bertugas memantau Gunung Galunggung, Dr. Adjat Sudrajat juga sulit untuk memperkirakan kapan letusan berakhir, bahkan mereka berdua khawatir rangkaian letusan selama beberapa bulan tersebut hanya merupakan letusan awal dari letusan yang lebih besar. Ketidakpastian waktu berakhirnya letusan akan menambah beban bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan kondisi tak menentu para penduduk yang berada di pengungsian. Letusan Gunung Galunggung kemudian baru berhenti secara penuh pada bulan Januari 1983 atau setelah 10 bulan dari masa awal letusan pada April 1982 (Lockwood dan Hazlett, 2010:9-10, 12).

Adjat Sudrajat dari Direktorat Vulkanologi menyebutkan bahwa letusan Gunung

Galunggung dapat dibagi ke dalam tiga fase letusan. Pertama adalah fase penghancuran kubah lava yang berlangsung dari bulan April hingga Mei 1982. Fase kedua berlangsung dari periode bulan Juni hingga November 1982. Serta fase terakhir berlangsung dari bulan Desember 1982 hingga Januari 1983. Menurut Adjat meskipun periode letusan yang sangat lama ini berakibat besar pada kerugian manusia dan alam, namun periode yang panjang ini justru mengurangi daya letusan sehingga mengurangi kerugian yang jauh lebih besar (Sudrajat dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986:100).

Bencana letusan Gunung Galunggung merupakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar pada masa Orde Baru. Letusan Gunung Galunggung telah merusak lebih kurang 94.000 ha lahan kebun dan sawah milik penduduk, selain itu juga mengancam 87.000 ha lahan tanaman pangan lain. Hal ini mengakibatkan 300.000 orang penduduk hidup dalam suasana keterbatasan bahan makanan dan air bersih selama beberapa bulan. Hingga bulan Januari 1983 atau akhir dari fase letusan Gunung Galunggung tercatat lebih dari 80.000 orang mengungsi dan sekitar 35.000 orang harus dipindahkan secara permanen dari daerah-daerah sekitar gunung. Ancaman bencana Gunung Galunggung bukan hanya berasal dari letusan dan guguran awan panas. Memasuki bulan September 1982 seiring dengan terjadinya musim hujan, ancaman banjir lahar dingin juga menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dan para penduduk (de Neve dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986b: 485; Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986: 411-412).

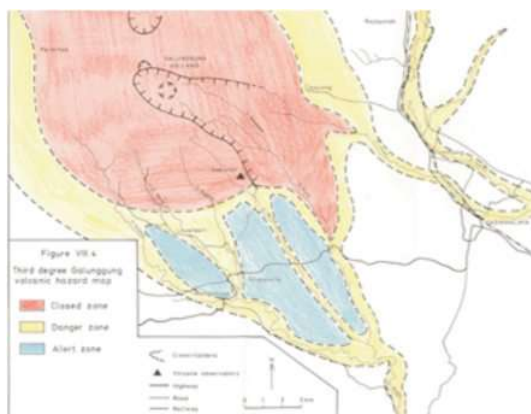
Penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi bencana Gunung Galunggung pada periode itu merupakan suatu pembahasan yang menarik. Selama periode letusan berlangsung pemerintah harus menghadapi situasi yang tidak menentu sebab tidak adanya kepastian kapan waktu berakhirnya letusan. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) Penanggulangan Bencana Alam berusaha mengatasi beragam situasi dengan mengerahkan sumber daya yang ada dari tingkat pusat hingga daerah.

### **III. PENANGANAN BENCANA LETUSAN GUNUNG GALUNGGUNG 1982-1983**

#### **A. Penanganan Para Pengungsi Gunung Galunggung**

Dasar hukum dari penanganan bencana alam di Indonesia ketika letusan Gunung Galunggung terjadi pada tahun 1982 hingga 1983 adalah Keputusan Presiden No.28 Tahun 1979 mengenai Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Alam (Bakornas PBA). Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana di tingkat nasional berkoordinasi dengan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) di tingkat provinsi dan kabupaten. Bakornas PBA dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sementara Satkorlak PBA dipimpin langsung oleh masing-masing kepala daerah yang dibantu oleh masing-masing komandan militer di daerah tersebut dengan bertanggung jawab kepada pimpinan Bakornas PBA. Bakornas PBA juga memiliki peran untuk mengatur dan mengkoordinasikan bantuan bencana alam yang berasal dari dalam maupun luar negeri, disamping itu lembaga ini juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam usaha melakukan usaha penanganan bencana di suatu daerah (Keppres No. 28/1979).

Bahaya bencana letusan Gunung Galunggung yang berlangsung selama delapan bulan dibagi kedalam tiga tingkat bahaya bencana. Pertama yakni bahaya primer yakni bahaya bencana yang diakibatkan langsung oleh material letusan itu sendiri. Bahaya-bahaya ini antara lain disebabkan oleh aliran lahar, uap dan awan panas, serta material pasir, debu, dan batu. Bahaya sekunder akibat letusan ini lebih disebabkan oleh aliran banjir lahar dingin yang



Gambar 3: Zonasi daerah-daerah tertutup, bahaya, dan rawan akibat letusan Gunung Galunggung 1982-1983 (Bronto, 1989)

akan terbawa oleh aliran sungai yang berhulu di Gunung Galunggung. Hingga bulan September 1982 material yang diperkirakan terbawa oleh arus sungai-sungai ini lebih kurang sebesar 84 juta m<sup>3</sup>. Menurut keterangan Satkorlak PBA Provinsi Jawa Barat akibat yang ditimbulkan oleh bencana banjir lahar dingin ini jauh lebih besar dari bahaya primer letusan. Hal ini disebabkan karena sungai-sungai yang berhulu di Gunung Galunggung ini melewati kota-kota seperti Bandung, Ciamis, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Sumedang, dan Cirebon. Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai usaha mengurangi resiko bencana yang lebih besar yang disebabkan oleh banjir lahar dingin ini.

Sementara itu bencana tersier yang ditimbulkan oleh letusan ini mencakup kerawanan pangan dan kesehatan di wilayah-wilayah yang terkena hujan abu letusan Gunung Galunggung (Laporan Gubernur, 1982).

Upaya pemerintah dilakukan dengan membagi zonasi bencana akibat letusan Gunung Galunggung ke dalam tiga zona yakni zona tertutup, yakni daerah yang memiliki tingkat bahaya paling tinggi. Pada zona tertutup ini aliran awan panas dan lahar akan meluncur langsung dari kawah Gunung Galunggung. Diameter daerah tertutup ini adalah sekitar 14 km. Daerah yang berada pada zona tertutup ini diharapkan bersih dari aktivitas manusia, mengingat sangat berbahayanya daerah ini. Zona selanjutnya adalah zona daerah berbahaya. Zona ini merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi. Sebab di kawasan ini terdapat pusat-pusat pemukiman masyarakat. Di daerah ini aktivitas awan panas memang tidak terlalu berbahaya seperti halnya di daerah tertutup, namun pemerintah sangat mengkhawatirkan ancaman banjir lahar dingin yang melalui daerah-daerah di sekitar sungai yang melintasi wilayah-wilayah ini (Bronto, 1989:334, 336-367).

Para penduduk yang berada di zona bahaya ini harus diungsingkan dari tempat tinggal mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bahaya yang lebih besar. Para penduduk di kawasan ini diharuskan tinggal di lokasi-lokasi penampungan yang disediakan oleh pemerintah, namun mereka juga dapat diperkenankan pulang apabila situasi tidak terlalu berbahaya. Ijin untuk kembali ke rumah diputuskan oleh pemerintah mengingat letusan



Gambar 4: Penduduk sekitar Galunggung saat terjadi hujan abu di sekitar desa mereka (Sumber: J.P. Lockwood and R. Hazlet, 2010)

Gunung Galunggung tidak terjadi secara terus menerus. Sementara untuk para penduduk yang berada di daerah waspada atau awas diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Satkorlak setempat apabila sewaktu-waktu juga harus diungsikan (Bronto, 1989: 336).

Menurut laporan dari Satkorlak Jawa Barat pada hari pertama letusan jumlah penduduk yang mengungsi sekitar 35.000 orang. Sementara sekitar 270.000 orang lain berada pada kondisi terancam akibat bahaya letusan. Jumlah korban meninggal dunia hingga bulan November 1982 tercatat berjumlah 58 orang.

Para korban yang meninggal dunia ini tidak seluruhnya disebabkan secara langsung oleh letusan gunung, mereka meninggal dunia sebagian besar disebabkan sakit akibat kedinginan, gangguan pernafasan, dan kekurangan gizi selama di pengungsian (Koesman, 1982:2-3).

Pemerintah Orde Baru ketika itu sangat memegang teguh prinsip gotong royong. Demikian pula ketika penanganan bencana letusan Gunung Galunggung, gotong royong menjadi sikap dasar yang harus dimiliki oleh pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penanganan bencana ini. Menurut Emil Salim sikap gotong royong ini dapat dilakukan dengan memobilisasi seluruh potensi yang ada di masyarakat.<sup>3</sup> Ia menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi korban bencana alam ini harus dilibatkan secara aktif untuk turut membantu dalam proses penanggulangan bencana. Demikian pula dengan masyarakat yang berada di luar zona bencana diharapkan juga turut berpartisipasi dalam upaya ini. Emil Salim juga menambahkan bahwa parapegawai negeri di tingkat pusat dan daerah serta militer dapat bekerjasama untuk membantu para korban bencana (Salim, 1982).

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Alam (Bakornas PBA) selaku koordinator lapangan penanggulangan bencana letusan Gunung Galunggung membagi penanganan ini ke dalam tiga jenis, yakni penanggulangan fisik, penanggulangan sosial kemanusiaan, dan penanggulangan sosial ekonomi (Laporan Gubernur, 1982). Penanggulangan fisik dalam upaya penanganan bencana letusan Gunung Galunggung dilakukan dengan cara pembangunan *bedeng-bedeng* pengungsian untuk memberikan tempat kepada para pengungsi yang membutuhkan. *Bedeng-bedeng* ini menampung sekitar 27.500 warga atau sekitar 5500 KK. Memasuki musim penghujan sekitar akhir tahun 1982, pemerintah mulai membangun tanggul-tanggul pengendali dan kantong-kantong yang menampung aliran lahar dingin. Bencana sekunder ini diperkirakan oleh pemerintah ketika itu akan menerjang sekitar 210 desa yang dihuni oleh sekitar 297.000 orang penduduk (Laporan Gubernur, 1982; Direktorat Vulkanologi, 1982a: 3.Laporan Menteri Sosial, 1982:11; Sudrajat, A. dan Chris Newhall, 1982:8).

Bakornas PBA juga membangun berbagai fasilitas dan sarana bagi para pengungsi yang tinggal di *bedeng-bedeng* darurat ini.<sup>4</sup> Fasilitas dan sarana ini berupa gudang-gudang penyimpanan makanan dan dapur-dapur umum. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satkorlak Jawa Barat sebelum dibangun dapur-dapur umum tidak tercipta koordinasi penyediaan makanan bagi para pengungsi. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pembagian jatah bantuan pangan (Direktorat Vulkanologi, 1982a: 4-5).

Pembangunan berbagai fasilitas, sarana, dan tempat perlindungan bagi para pengungsi, serta fasilitas penanggulangan bencana ini dilakukan sebagian besar dengan melibatkan para pengungsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meredam konflik sosial yang kemungkinan timbul akibat kejenuhan para pengungsi selama tinggal di *bedeng*, serta tidak adanya aktivitas pekerjaan selama berada di sana.<sup>5</sup> Mobilisasi para pengungsi untuk bekerja di proyek-proyek bencana ini oleh pemerintah ketika itu disebut sebagai program padat karya bencana alam dan padat karya gotong royong. Selain sebagai upaya meredam konflik program ini juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat (Laporan Bupati

---

<sup>3</sup> Menurut John Bowen (1986), gotong royong bukan saja dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama antar masyarakat untuk mewujudkan suatu hal yang menyangkut kepentingan bersama, namun juga dapat diartikan sebagai suatu mobilisasi massa untuk suatu kepentingan politik atau dalam hal bencana Galunggung adalah dalam hal penanganan bencana.

<sup>4</sup> *Bedeng-bedeng* ini masing-masing terdiri dari 10 kamar dengan ukuran per kamar sekitar 3x3 m<sup>2</sup> yang per kamar dihuni oleh satu keluarga. Di setiap *bedeng* ini disediakan sarana dapur umum dan sarana kamar mandi umum. Kondisi kamar mandi umum ini sangat memprihatinkan sebab pada awalnya satu kamar mandi umum ini digunakan oleh sekitar 50 orang pengungsi, namun setelah dibantu oleh ILO yang membantu penambahan jumlah kamar mandi ini, satu kamar mandi dapat digunakan oleh 20 orang. Di lokasi *bedeng-bedeng* ini juga disediakan sarana kesehatan yang dikelola oleh Palang Merah Indonesia (PMI) (Koesman, 1982: 3; Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986: 417).

<sup>5</sup> Proyek milik pemerintah pusat yang dikerjakan oleh para pengungsi Galunggung adalah pembangunan Waduk Saguling di Kabupaten Bandung, proyek pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), serta proyek-proyek irigasi di beberapa daerah. (Laporan Bupati Tasikmalaya, 1982: 3; Laporan Bupati Garut, 1982: 5; Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986: 419)

Tasikmalaya, 1982:3; Laporan Gubernur, 1982; Laporan Bupati Garut, 1982:5; Salim, 1982:4; Sudrajat dan Chris Newhall; 1982:12; Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986:414).<sup>6</sup>

Selama masa penanganan bencana para pengungsi ini ditempatkan ke dalam *bedeng-bedeng* hingga tanggal 30 November 1982. Selama tinggal di *bedeng* ini mulai tanggal 5 April hingga 5 Juni 1982 para pengungsi diberikan uang sejumlah Rp. 100,- dan beras seberat 400 gr untuk masing-masing kepala. Kemudian tanggal 6 Juni hingga 10 Juli 1982 mereka diberikan uang sebesar Rp. 100,- dan beras seberat 300 gr per kepala. Uang yang diberikan merupakan uang untuk mengganti biaya pemberian lauk pauk. Namun akibat tidak meratanya penerimaan bantuan dan konflik yang terjadi saat pemberian bantuan maka mulai tanggal 10 Juli hingga 30 November 1982 bantuan beras dan uang lauk pauk untuk para pengungsi ditangguhkan, selanjutnya pemberian makan kepada para pengungsi akan dikelola oleh pemerintah melalui keberadaan dapur-dapur umum (Koesman 1982:3; Laporan Gubernur, 1982; Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986:416).

Dapur-dapur umum ini dikelola oleh Departemen Sosial di bawah koordinasi Satkorlak I dan Satkorlak II, namun setelah tanggal 1 Agustus 1982 dapur umum ini dikelola oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah koordinasi Bakornas PBA. Dalam pembiayaan dapur umum ini PMI menyediakan dana sekitar US \$ 2.000.000 atau Rp. 1.300.000.000. Dana ini sebagian didapat dari sumbangan negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga kemanusiaan dunia seperti UNICEF, Palang Merah Internasional, UNDP, serta lembaga lainnya. Bantuan-bantuan yang diberikan ini bukan saja sebatas pada bantuan pangan, namun juga bantuan-bantuan perlengkapan dan peralatan teknik (Laporan Menteri Sosial, 1982:10).<sup>7</sup>

Peran lembaga internasional dan bantuan dari negara-negara sahabat ini berada di bawah koordinasi PBB melalui peran UNDP. Gamil H. Hamdy mengatakan bahwa PBB bekerjasama dengan Bakornas PBA dalam operasi bala bantuan. PBB bersama dengan *World Food Program (WFP)* melaksanakan program *food for work* (makan untuk kerja), program ini mendukung program padat karya gotong royong dengan menyediakan bantuan beras kepada sekitar 250.000 orang selama lima bulan. Selain itu *International Labour Organization (ILO)* yang bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum membangun sarana-sarana publik seperti tanggul penahan lahar dingin, perbaikan waduk dan sarana irigasi, perbaikan *bedeng* pengungsian (*shelter*), serta penyediaan fasilitas air bersih. *Food and Agricultural Organization (FAO)* juga ambil bagian dalam usaha perbaikan sawah-sawah yang rusak akibat guguran abu vulkanik dan awan panas (Laporan Perwakilan UNDP, 1982:2-4; Laporan Menteri Sosial, 1982:19).<sup>8</sup>

## **B. Program Transmigrasi Bencana Alam Galunggung**

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru dalam penanganan bencana adalah upaya untuk selekasnya menghindari keresahan sosial yang dapat ditimbulkan oleh para pengungsi. Keresahan sosial ini diakibatkan oleh kerawanan pangan, tidak adanya pendapatan ekonomi, kondisi di sekitar lingkungan pengungsian yang

---

<sup>6</sup> Para pengungsi yang bekerja di program padat karya gotong royong diberikan upah berupa beras seberat 300gr per hari. Program padat karya gotong royong Galunggung ini dimulai dari bulan September 1982. Program padat karya gotong royong ini bekerja di proyek-proyek sekitar tempat pengungsian. Sedangkan untuk program pada karya bencana alam para pengungsi ini dipekerjakan pada proyek-proyek pembangunan tanggul dan kolam penampung aliran lahar dingin. Para pekerja di proyek ini diberikan upah sebesar Rp. 600,- per hari (Koesman, 1982: 4; Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986: 419).

<sup>7</sup> PMI memberikan kupon-kupon makan kepada para pengungsi agar mereka tidak rebutan ketika dibagikan makanan. PMI juga mengelola bantuan-bantuan dari luar negeri seperti sarana sanitasi, obat-obatan, perlengkapan dan makanan untuk bayi dan anak-anak, pakaian dan selimut, serta lainnya. PMI berada di bawah koordinasi Bakornas PBA yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sosial (Laporan Menteri Sosial, 1982: 10).

<sup>8</sup> Upaya pembangunan tanggul-tanggul sepanjang 7 km di Sungai Cikunir, Cibijakan, dan Ciloseh untuk mengatasi aliran banjir lahar dingin ini berhasil mengatasi bencana yang lebih besar. Sebab tanggul-tanggul ini berhasil menghindarkan Kota Tasikmalaya yang ketika itu memiliki jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa dari terjangkit banjir lahar dingin ini (McClelland, 1982c).

memprihatinkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melalui program transmigrasi dan relokasi penduduk Program transmigrasi berdasarkan Undang-Undang Transmigrasi No. 3/1972 pasal 1 menyebutkan bahwa pemindahan penduduk untuk melakukan kegiatan transmigrasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pada program pemerataan pembangunan serta karena peristiwa bencana alam (UU Transmigrasi No.3/1972; Koesman, 1982:4; Laporan Bupati Garut, 1982:4; Laporan Menteri Sosial, 1982:11; Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986: 416).

Para pengungsi yang ditransmigrasikan atau direlokasi berasal dari daerah bahaya I dan II. Para pengungsi ini diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan lokasi tinggal, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, serta kemampuan dan pengetahuan dasar yang mereka miliki sebelum dipindahkan. Para pengungsi ini direlokasi ke dalam beberapa pilihan yang ditentukan oleh pemerintah. Pilihan-pilihan ini antara lain: 1) Program transmigrasi, 2) Program relokasi ke daerah lain di luar daerah bencana dengan diberikan bantuan modal produksi, 3) Program relokasi dan pemberdayaan untuk menjadi petani ikan, 4) Program relokasi ke perkebunan-perkebunan inti rakyat, dan 5) Pemberian modal dan kredit usaha bagi penduduk yang memiliki usaha dan keahlian (Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986: 416-417).

Kerusakan daerah pemukiman akibat letusan Gunung Galunggung dapat menimbulkan



Gambar 5: Kondisi Desa Cipanas yang berjarak tiga kilometer dari puncak Gunung Galunggung (Sumber: J.P. Lockwood and R. Hazlett, 2010)

persoalan sosial bagi para pengungsi. Kerusakan dan hilangnya daerah asal tinggal mereka juga diikuti oleh hilangnya mata pencaharian bagi para penduduk yang sebagian besar mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Kerusakan-kerusakan akibat letusan ini mencakup kerusakan pada areal pertanian, perkebunan, dan tambak-tambak ikan milik rakyat di sekitar wilayah Garut dan Tasikmalaya. Selain terjadi krisis tempat tinggal dan makanan, dampak letusan Gunung Galunggung juga mengakibatkan terjadinya "rawan air". Menurut Laporan dari kelompok kerja

"D" Direktorat Vulkanologi, kondisi "rawan air" ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat yang menjadi korban letusan Gunung Galunggung di daerah rawan I dan II harus dipindahkan. Hal ini karena letusan Gunung Galunggung telah merusak mata air-mata air di areal hutan dan sumur-sumur milik warga (Laporan Bupati Tasikmalaya, 1982:3; Direktorat Vulkanologi, 1982b:8).

Keputusan untuk memindahkan penduduk dari area bencana letusan Gunung Galunggung juga dipengaruhi oleh kondisi para pengungsi pada saat itu. Para pengungsi yang telah beberapa bulan hidup di pengungsian diliputi tekanan dan keresahan sosial dan ekonomi yang sangat besar karena harus kehilangan keluarga, tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Bila kondisi ini dibiarkan, ditakutkan akan menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan fisik dan mental para pengungsi, serta tekanan psikologis diantara para pengungsi yang dapat menciptakan keresahan di lokasi pengungsian (Direktorat Vulkanologi, 1982b:12).

Faktor lain yang menjadi dasar dari transmigrasi para korban letusan yakni terganggunya proses belajar mengajar bagi anak-anak di lokasi pengungsian yang dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang dari anak-anak ini. Bencana letusan Gunung Galunggung juga

telah turut merusak sistem pranata sosial di dalam masyarakat. Masyarakat yang selama ini hidup dalam lingkungan komunal yang homogen (desa), harus hidup berbaur dan saling berinteraksi dengan masyarakat antar desa, hal ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan sosial di pengungsian (Direktorat Vulkanologi, 1982b:12).<sup>9</sup>

Sebelum mentransmigrasikan para pengungsi Galunggung pemerintah provinsi Jawa Barat mengklasifikasikan para pengungsi ke dalam tingkatan kondisi ekonomi. Pemerintah membagi klasifikasi ini menjadi tiga kelompok yakni kelompok pengungsi yang mampu secara ekonomi, pengungsi yang memiliki kemampuan ekonomi menengah, serta kelompok ekonomi tidak mampu.<sup>10</sup> Bagi para pengungsi dari kelompok ekonomi mampu dan menengah ini pemerintah memberikan kredit usaha dengan bunga ringan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Mereka akan dititipkan atau ditempatkan di desa-desa di daerah lain yang tidak terkena dampak bencana Mereka juga diberikan pilihan untuk ikut atau tidak dalam program transmigrasi tanpa adanya paksaan dari pemerintah. Sedangkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu diwajibkan untuk ikut dalam program transmigrasi. (Koesman, 1982:4; Laporan Gubernur, 1982).

Para pengungsi yang ditransmigrasikan ini berasal dari dua wilayah Kabupaten yakni Tasikmalaya dan Garut. Dari Tasikmalaya jumlah pengungsi yang ditransmigrasikan sebanyak 3390 KK atau sekitar 14290 jiwa. Sedangkan dari Kabupaten Garut yang ditransmigrasikan sebanyak 2535 KK atau sekitar 11920 jiwa (Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986:417).<sup>11</sup> Para pengungsi ini pada awalnya enggan untuk dipindahkan atau ditransmigrasikan, hal ini terjadi sebab sebagian masyarakat merasa bahwa lokasi tujuan transmigrasi tidak sesubur tanah asal mereka sebelum letusan Gunung Galunggung. Salah satu upaya untuk mendorong transmigrasi para pengungsi adalah melalui berbagai penyuluhan yang dilakukan oleh Departemen Sosial. Penyuluhan-penyuluhan oleh Departemen Sosial ini juga dibantu oleh lembaga-lembaga lain seperti Bina Patria dan Lembaga Kepeloporan Transmigrasi Indonesia (LKTI) (Laporan Gubernur, 1982; Laporan Bupati Garut, 1982:5; Laporan Menteri Sosial, 1982:12).<sup>12</sup>

*Kompas* sempat menuliskan sebuah kisah tentang penyuluhan transmigrasi ini berdasarkan kisah dari seorang pengungsi Galunggung.

“Sebagian warga di sekitar Galunggung yang desanya rusak parah dan terkubur, seperti Linggajati, Sukagalih, Sukaratu, dan Sinagar, akhirnya ikut ajakan bertransmigrasi ke Sumatera, termasuk Eming.” Di pengungsian, ada orang-orang yang mengajak bertransmigrasi,” ujar Eming yang menikah dengan pemuda kenalannya di pengungsian. Sebelum berangkat ke lokasi transmigrasi di Sekayu, Jambi, Eming sekali lagi menengok kampungnya yang tertutup material Galunggung. Rumah keluarganya setengah terkubur pasir. Rumah tetangganya malah ada yang tak tampak lagi atapnya. Kampung-kampung terdekat dengan Galunggung, seperti Pasir Ngempong, bahkan habis terbakar, terhajar awan panas. Rasa nyeri, takut, dan hilang asa menderanya sekaligus menguatkan niatnya bertransmigrasi ke Sumatera. “Awalnya sedih dan khawatir jauh dari saudara. Alhamdulillah, kami sekeluarga jadi transmigran, kumpul tidak pisah,” ujar Eming yang berangkat transmigrasi bersama ribuan warga Galunggung

---

<sup>9</sup> Pemerintah sebenarnya telah merekrut satuan-satuan petugas (Satgas) untuk mengamankan lokasi pengungsian. Satgas-satgas ini terdiri dari elemen sipil dan militer yang membantu menjaga keamanan di lingkungan lokasi pengungsian. Namun hingga bulan September 1982, letusan Galunggung belum nampak akan mereda (Laporan Bupati Tasikmalaya, 1982: 4; Satkorlak I Jawa Barat, 1982: 4).

<sup>10</sup> Para pengungsi dari kelompok ekonomi mampu ini terdiri dari para pemilik tanah, pegawai negeri, para pekerja profesional, dan pedagang besar; para pengungsi ekonomi menengah terdiri dari para buruh, tukang, dan pedagang kecil; serta kelompok ekonomi tidak mampu terdiri dari para petani penggarap (Laporan Menteri Sosial, 1982: 11-12).

<sup>11</sup> Selain ditransmigrasikan pemerintah juga menempatkan sekitar 200 KK untuk menempati lahan dan bekerja di Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Arinem di Garut. Pemerintah juga memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha perikanan bagi sekitar 900 KK (Satkorlak dalam Katili J.A, Adjat Sudrajat, K. Kusumadinata, 1986: 417)

<sup>12</sup> Para pengungsi yang bertransmigrasi ke Sumatera ini sebagian kembali lagi ke Galunggung dalam rentang periode 1985 hingga 1993. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dan kerinduan akan tanah kelahiran menjadi alasan mereka untuk kembali. Kembalinya mereka pun juga seiring dengan berkurangnya abu vulkanik di sekitar Gunung Galunggung karena penambangan pasir yang terjadi secara besar-besaran sejak tahun 1983 (Chandra, 2012).

(Chandra, 2012).

Pemindahan penduduk dari lokasi bencana bukanlah hal baru dalam sejarah kebencana-alaman di Indonesia. Pemindahan penduduk menjadi solusi bagi pemerintah untuk menata kembali lingkungan yang terkena dampak bencana serta menata kembali kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Namun terkadang pemindahan penduduk dari lokasi bencana ini tidak disertai pemindahan nilai-nilai sosial dan budaya dari daerah asal, sehingga para transmigran ini cenderung hanya bertahan selama beberapa waktu kemudian mereka akan kembali lagi ke daerah asal mereka.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hal yang terpenting dari seluruh upaya penanganan bencana Letusan Gunung Galunggung adalah mengenai peran pemerintah untuk menciptakan kondisi yang aman dan terkendali di wilayah bencana dan lokasi pengungsian. Pemerintah selalu berupaya untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban dalam kondisi yang baik. Beberapa upaya yang dilakukan adalah: 1) membentuk satgas-satgas yang bekerja dalam unit-unit kerja sesuai dengan bidang keahliannya agar tidak terjadi konflik kepentingan selama penanganan bencana; 2) mengerahkan pihak keamanan dari elemen militer maupun sipil agar menciptakan suasana yang kondusif; 3) membuat suasana kehidupan di lokasi pengungsian berada dalam situasi yang jauh dari gesekan-gesekan sosial dengan melakukan pengaturan-pengaturan terhadap pemberian fasilitas bantuan kepada para pengungsi; 4) memberikan lapangan pekerjaan di sektor pekerjaan padat karya kepada para pengungsi agar mereka memperoleh pendapatan; serta 5) mengupayakan relokasi dari daerah bencana sehingga para pengungsi memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Kebijakan sentralistik Orde Barunampak begitu nyata dalam upaya penanganan letusan Gunung Galunggung. Koordinasi yang terstruktur dari tingkat pusat yang berada dibawah Menteri Kesejahteraan Rakyat melalui Bakornas PBA hingga ke tingkat satuan-satuan petugas di lapangan berjalan sangat teratur. Mobilisasi massa untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pun telah berhasil meredam gejala dari gesekan sosial yang dapat ditimbulkan oleh para pengungsi. Kebijakan Orde Baru untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban serta mobilisasi massa rupanya menjadi salah satu keberhasilan dari penanganan bencana letusan Gunung Galunggung ini.

### **B. Saran**

Kajian mengenai penanganan bencana akibat letusan Gunung Galunggung ini merupakan suatu kajian yang menarik. Kajian ini diharapkan mampu membuka wacana-wacana lain yang terkait dengan peristiwa bencana alam di Indonesia seperti masalah mitigasi atau pemulihan bencana dalam kerangka kajian historis. Kajian penanganan bencana letusan Gunung Galunggung ini merupakan awal dari kajian-kajian lain yang terkait dengan letusan Gunung Galunggung. Beberapa kajian yang dapat diulas antara lain mengenai kehidupan masyarakat korban letusan Galunggung selama di lokasi pengungsian atau selama berada di wilayah transmigrasi. Di samping itu juga dapat diulas mengenai kehidupan masyarakat di sekitar lereng Gunung Galunggung sesudah peristiwa terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Arsip**

- Direktorat Vulkanologi. 1982a. "Laporan Hasil Kerja Grup "C": Bidang Penerangan dan Penyuluhan Masyarakat" dalam Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982.
- \_\_\_\_\_. 1982b. "Laporan Hasil Kerja Grup "D": Bidang Ekologi, Ekonomi, dan Transmigrasi" dalam Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982.
- Keputusan Presiden No.28 Tahun 1979 Mengenai Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Alam (Bakornas PBA).
- Laporan Bupati Garut. 1982. "Laporan Situasi Letusan Gunung Galunggung di Kabupaten Garut" dalam Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982.
- Laporan Bupati Tasikmalaya. 1982. "Laporan Situasi Letusan Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya" dalam rangka Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Bantuan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia 14 Agustus 1982.
- Laporan Direktorat Vulkanologi. 1982. "Laporan Hasil Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982". Bandung: Direktorat Vulkanologi.
- Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat. 1982. "Situasi Bencana Alam Galunggung dan Penanganannya" dalam Rapim Bakornas PBA tanggal 16 September 1982 di Jakarta.
- Laporan Menteri Sosial. 1982. "Usaha-Usaha Penanggulangan Aspek-Aspek Non Fisik Akibat Bencana Alam Gunung Galunggung" dalam Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982.
- Laporan Perwakilan UNDP. 1982. "Pidato Sambutan dan Laporan Peran PBB Dalam Usaha Penanganan Bencana Alam Galunggung" dalam Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982.
- Koesman, A., (1982). "Pengalaman dan Usaha dalam Menghadapi Bahaya Sekunder Letusan Gunung Galunggung" dalam Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982.
- Salim, E., (1982). "Hikmah Galunggung". Pidato dalam acara pembukaan Lokakarya Nasional Penanggulangan Bencana Alam Galunggung pada 20-25 September 1982.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1972* tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

## **Buku dan Artikel**

- Bankoff, G., Joseph Christensen. (2016). *Natural Hazards and People in The Indian Ocean World: Bordering on Danger*. New York: Palgrave MacMillan.
- Bobrowsky, P. T. (ed.). (2013). *Encyclopedia of Natural Hazard*. London: Springer Reference.
- Brassard, C., Raffin, A. (2011). Resilience in Post Disaster Socience: From Crisis to Development dalam *Asian Journal of Social Science*, Volume 39, Issue 4, pages 417-424.
- Bronto, S. (1989). "Volcanic Geology of Galunggung, West Java, Indonesia". *Thesis*. Canterbury: University of Canterbury.
- BRR Aceh-Nias. (2015). *BRR Aceh-Nias: Post-Disaster Reconstruction Governance*. Berlin Springer.
- De Neve, G.A. (1986a). "Eruption and Opinions on Earlier Galunggung Activities: Investigation Before The 1982-1983 Eruption" dalam Katili, J.A., Adjat Sudrajat, dan Kusumadinata.(1986). *Letusan Gunung Galunggung 1982-1983: Kumpulan*

- Makalah Hasil Penyelidikan. Bandung: Direktorat Vulkanologi.
- \_\_\_\_\_. (1986b). “*Effects in The Atmosphere of The Galunggung Eruption*” dalam Katili, J.A., Adjat Sudrajat, Kusumadinata. (1986). Letusan Gunung Galunggung 1982-1983: Kumpulan Makalah Hasil Penyelidikan. Bandung: Direktorat Vulkanologi.
- Henley, David., Henk Schulte Nordholt (ed.). (2015). *Environment, Trade, and Society in Southeast Asia: A Longue Duree Perspectives*. Leiden: Brill.
- Katili, J.A., Adjat Sudrajat, Kusumadinata. (1986a). Letusan Gunung Galunggung 1982-1983: Kumpulan Makalah Hasil Penyelidikan. Bandung: Direktorat Vulkanologi.
- Kusumadinata, K. (1982). “Data Dasar Gunung Galunggung” dalam Katili, J.A., Adjat Sudrajat, dan Kusumadinata. Letusan Gunung Galunggung 1982-1983: Kumpulan Makalah Hasil Penyelidikan. Bandung: Direktorat Vulkanologi.
- Levang, Patrice. (2003). *Ayo Ke Tanah Sebrang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lockwood, John P., Richard W, Hazlett. (2010). *Volcanoes: Global Perspective*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- McClelland, L (ed.). (1982a). “Report on Galunggung (Indonesia)”. *Scientific Event Alert Network Bulletin*, 7 (3).
- \_\_\_\_\_. (1982b). “Report on Galunggung (Indonesia)”. *Scientific Event Alert Network Bulletin*, 7 (4).
- \_\_\_\_\_. (1982c). “Report on Galunggung (Indonesia)”. *Scientific Event Alert Network Bulletin*, 7 (6).
- Newhall, C.G. (1982). The Volcanic Explosivity Index (VEI) an estimate of explosive magnitude for historical volcanism, *J. Geophys. Res.*, 87(C2), 1231-1238.
- Reid, A., (2015). “*History and Seismology in the Ring of Fire: Punctuating the Indonesian Past*” dalam Henley, David., Henk Schulte Nordholt (ed.). *Environment, Trade, and Society in Southeast Asia: A Longue Duree Perspectives*. Leiden: Brill.
- \_\_\_\_\_. (2016). “*Revisiting Southeast Asia History with Geology: Some Demographic Consequences of a Dangerous Environment*” dalam Bankoff, Greg, and Joseph Christensen (ed.). *Natural Hazard and People in Indian Ocean World*. New York: Palgrave McMillan.
- Samadhi, Tjokorda Niratha. (2014). “*BRR Aceh-Nias: Post-Disaster Reconstruction Governance*” dalam Butt, Simon, Hitoshi Nasu, Luke Nottage (ed.). *Asia-Pacific Disaster Management: Comparative and Socio Legal Perspectives*. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Satkorlak PBA tk. I. (1986). “Pengalaman Dalam Menghadapi Letusan Gunung Galunggung 1982-1983” dalam Katili, J.A., Adjat Sudrajat, dan Kusumadinata. Letusan Gunung Galunggung 1982-1983: Kumpulan Makalah Hasil Penyelidikan. Bandung: Direktorat Vulkanologi.
- Schrikker, Alicia. (2016). “*Disaster Management and Colonialism in the Indonesian Archipelago, 1840-1920*” dalam Bankoff, Greg dan Joseph Christensen. *Natural Hazards and People in The Indian Ocean World: Bordering on Danger*. New York: Palgrave McMillan.
- Seekins, Donald M. (2009). “*State, Society and Natural Disaster: Cyclone Nargis in Myanmar (Burma)*”. *Asian Journal of Social Science*, 37: 717737.
- Shaw, R., (2015). *Recovery From The Indian Ocean Tsunami*. New Delhi: Springer
- Sudrajat, A., (1986). “Catatan Tentang Kronologi Letusan Galunggung 1982-1983” dalam Katili, J.A., Adjat Sudrajat, dan Kusumadinata. Letusan Gunung Galunggung 1982-1983: Kumpulan Makalah Hasil Penyelidikan. Bandung: Direktorat Vulkanologi.

- Chandra, A., 2012. “Bangkit Dari Kubur Abu Galunggung” dalam *Harian Kompas* 4 April 2012.
- Muhtadi, D., 2012. “Letusan Dahsyat di Penghujung Abad Ke-20” dalam *Harian Kompas* pada 26 Juni 2015